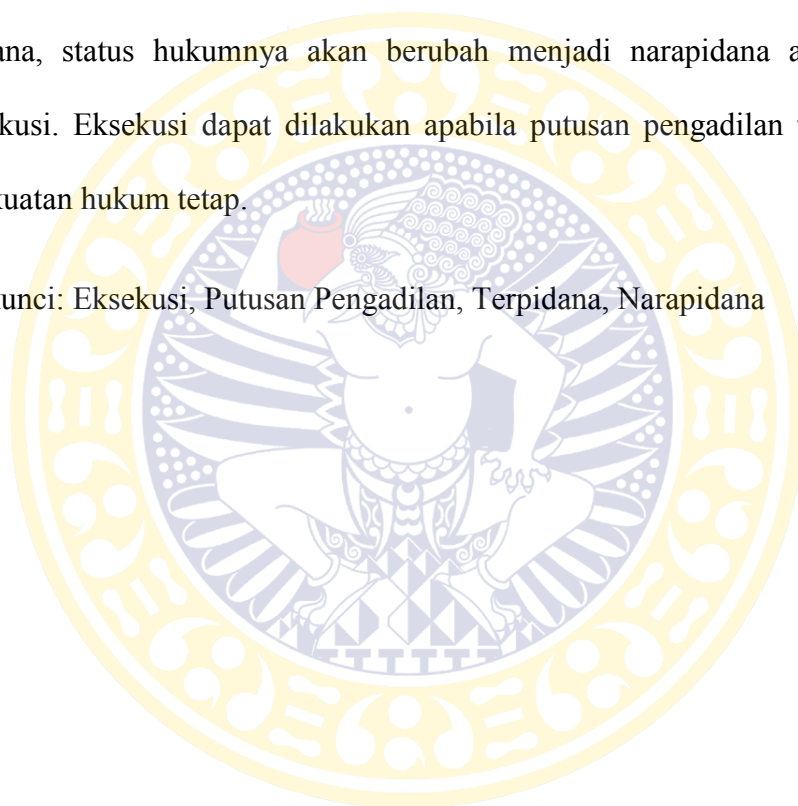


ABSTRAK

Keterlambatan pengiriman salinan putusan pengadilan sering menjadi alasan seorang terpidana untuk menolak di eksekusi tanpa adanya salinan surat putusan pengadilan tersebut. Eksekusi merupakan sesuatu yang penting dalam hukum acara pidana, karena pelaksanaan eksekusi berkaitan dengan status hukum seorang terpidana, status hukumnya akan berubah menjadi narapidana apabila sudah dieksekusi. Eksekusi dapat dilakukan apabila putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

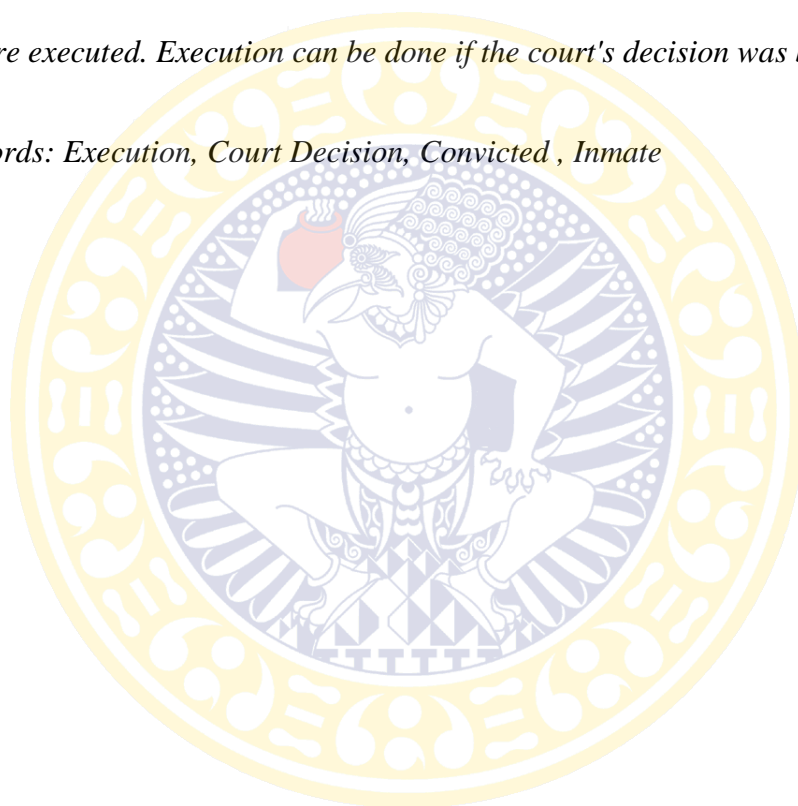
Kata kunci: Eksekusi, Putusan Pengadilan, Terpidana, Narapidana



ABSTRACT

Delays in delivery of a copy of a court decision is often the reason a person sentenced to refuse execution without the official copy of the court decision. Execution is critical in criminal procedural law, because it relates to the execution of a convicted legal status, legal status will be changed to inmates when they are executed. Execution can be done if the court's decision was binding.

Keywords: Execution, Court Decision, Convicted , Inmate



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

